

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah 1.) Untuk mengetahui pengaturan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi. 2.) Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap pembayaran uang pengganti yang tidak memenuhi nilai kerugian negara dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1.) Bagaimana pengaturan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi 2.) Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap pembayaran uang pengganti yang tidak memenuhi nilai kerugian negara dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu metode penelitian yuridis normatif dengan membedah dan menganalisis Undang-undang tentang tindak pidana korupsi. Hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa uang pengganti adalah suatu akibat perbuatan korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pengaturan mengenai pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi telah diatur di dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan masih menghadapi tantangan serius dalam mengembalikan kerugian negara secara utuh karena banyak terpidana tidak membayar uang pengganti dan malah menjalani pidana subsider. Hambatan lain termasuk minimnya pelacakan aset, aset yang disamarkan atau dialihkan ke pihak ketiga, serta belum adanya undang-undang khusus yang mengatur perampasan aset secara non-konvensional seperti *non-conviction based asset forfeiture*. yang berarti masih terdapat beberapa kelemahan dan kekaburan norma sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum oleh karena itu perlunya pembaharuan kebijakan hukum pidana terhadap pembayaran uang pengganti untuk memastikan bahwa uang negara yang dirampas melalui korupsi dapat dikembalikan secara maksimal.

Kata Kunci : *Pembayaran Uang Pengganti, dan Tindak Pidana Korupsi*

**CRIMINAL LEGAL POLICY ON PAYMENT OF REPLACEMENT MONEY
THAT DOES NOT MEET THE VALUE OF STATE LOSSES IN
CORRUPTION CRIMINAL ACTS IN INDONESIA**

ABSTRACT

The purpose of this study is 1.) To find out the regulation of replacement money payments in corruption crimes. 2.) To find out and analyze the criminal law policy on replacement money payments that do not meet the value of state losses in corruption crimes in Indonesia. The formulation of the problem in this study is: 1.) How are the regulations for replacement money payments in corruption crimes 2.) How is the criminal law policy on replacement money payments that do not meet the value of state losses in corruption crimes in Indonesia. The method used in the study is the normative legal research method by dissecting and analyzing the Law on corruption crimes. The results of this study can be stated that replacement money is a result of corruption that harms state finances or the country's economy. The regulation on replacement money payments in corruption crimes has been regulated in Article 18 of Law Number 30 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption and still faces serious challenges in returning state losses in full because many convicts do not pay replacement money and instead serve subsidiary sentences. Other obstacles include minimal asset tracking, assets that are disguised or transferred to third parties, and the absence of specific laws governing non-conventional asset forfeiture such as non-conviction based asset forfeiture. which means that there are still several weaknesses and unclear norms that cause legal uncertainty, therefore it is necessary to update the criminal law policy on the payment of replacement money to ensure that state money seized through corruption can be returned to the maximum.

Keywords: Replacement Money Payment, and Corruption